

**PROGRAM WAJIB BELAJAR DI SURABAYA
TAHUN 1984-1985 DALAM PEMBERITAAN
MEDIA MASSA CETAK**

NAIS LARAS WATI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: nais_2708@ymail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Media massa dalam perkembangannya dipengaruhi oleh sistem politik pemerintahan yang ada. Fungsi dan peran media massa pada masa Orde Baru banyak terlihat dalam penyampaian berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Wajib belajar menjadi salah satu program kebijakan pendidikan yang memanfaatkan berbagai media yang ada untuk menyebarkan program tersebut. Perluasan kesempatan belajar dan suksesnya pelaksanaan program wajib belajar di Surabaya juga didukung oleh media massa cetak yang menyajikan berbagai artikel mengenai wajib belajar.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana program wajib belajar di Surabaya Tahun 1984-1985 dalam pemberitaan media massa cetak? dan (2) Bagaimana dampak pemberitaan media massa cetak terhadap program wajib belajar di Surabaya Tahun 1984-1985?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surabaya Post merupakan surat kabar yang paling banyak memuat pemberitaan mengenai wajib belajar dibandingkan surat kabar lain, yakni Jawa Pos dan Kompas. Wajib Belajar dalam pemberitaan surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos dan Kompas terlihat pada sajian artikel yang memberikan informasi mengenai wajib belajar. Pemberitaan dalam media massa cetak mengenai wajib belajar secara tidak langsung memberikan dampak terhadap wajib belajar di Surabaya. Dampak yang ditimbulkan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai wajib belajar dan peningkatan jumlah murid, guru dan gedung Sekolah Dasar.

Kata Kunci: Wajib Belajar, Surabaya, Media Massa Cetak.

Abstract

The mass media in its development is influenced by the existing political system of government. The function and role of the mass media during the New Order period was evident in the delivery of various policies undertaken by the New Order government. Compulsory learning becomes one of the educational policy programs that utilize various existing media to spread the program. The opportunity to learn and the success of compulsory education program in Surabaya is also supported by print media which presents various articles on compulsory education.

The problems studied in this research are: (1) How compulsory study program in Surabaya Year 1984-1985 in reporting mass media print? And (2) How is the impact of mass media reporting on compulsory education program in Surabaya 1984-1985?. This study uses historical research methods consisting of four steps: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography.

The results of this study indicate that Surabaya Post is the most widely published newspaper about compulsory education compared to other newspapers, namely Jawa Pos and Kompas. Compulsory Learning in the newspaper coverage Surabaya Post, Java Post and Compass seen in the article offerings that provide information on compulsory education. News coverage in printed mass media about compulsory education indirectly impact on compulsory education in Surabaya. The impacts are increasing the knowledge of Surabaya people about compulsory education and increasing the number of students, teachers and elementary school buildings.

Keywords: Compulsory Learning, Surabaya, Mass Media Print.

PENDAHULUAN

Negara demokrasi merupakan suatu negara yang mengikut sertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan di negara demokrasi dapat ditunjukkan melalui penyampaian pendapat mengenai kebijakan yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintahan, baik itu disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Media massa merupakan salah satu sarana yang dapat dijadikan rakyat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mengenai pemerintahan. Perkembangan media massa dalam suatu negara ditentukan oleh bagaimana situasi dan kondisi politik yang berkembang di negara tersebut. Fungsi dan peran media massa pada masa Orde Baru banyak terlihat dalam penyampaian berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Program pemerintahan Orde Baru tertuang dalam Kabinet Ampera. Kabinet Ampera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera, yang bertujuan untuk memenuhi dan melaksanakan Tri Tuntutan Rakyat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan yang perlu *diambegparamartakan*¹. Tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan pemerintah Orde Baru yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1984. Rencana penyelenggaraan wajib belajar sebelumnya telah ditetapkan pada GBHN 1978 maupun 1983. Pada GBHN 1978 ditetapkan sebagai awal periode persiapan wajib belajar, sedangkan pada GBHN 1983 ditetapkan sebagai awal periode dimulainya wajib belajar². Perluasan kesempatan pendidikan dasar bagi anak usia 7-12 tahun merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh program wajib belajar.

Program wajib belajar dilaksanakan secara meluas di Indonesia, hal ini guna tercapainya pemerataan pembangunan dalam bidang pendidikan. Pemerintah Orde Baru memanfaatkan berbagai media massa cetak yang ada untuk menyebarkan program tersebut. Daerah Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur juga ikut andil dalam melaksanakan kebijakan program wajib belajar, karena di Surabaya masih terdapat anak usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 1.665 pada

akhir Pelita III (1983/1984) yang belum tertampung di Sekolah Dasar. Media massa cetak di Surabaya juga banyak memuat pemberitaan mengenai program wajib belajar. Oleh karena itu peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana **program wajib belajar di Surabaya Tahun 1984-1985 dalam pemberitaan media massa cetak.**

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode sejarah. Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi³.

Tahap pertama adalah heuristik, tahap pencarian sumber yang diperlukan untuk menunjang penelitian, baik sumber primer, maupun sekunder. Sumber primer yang didapatkan adalah surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos dan Kompas yang memuat beberapa pemberitaan mengenai wajib belajar yang didapatkan penulis pada saat melakukan studi pustaka di Perpustakaan Medayu Agung Pak Wie dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Penulis juga mendapatkan sumber primer berupa arsip di Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya serta di Arsip Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sumber sekunder yang didapatkan penulis berupa buku dan dokumen yang berkaitan dengan wajib belajar.

Tahap kedua adalah melakukan kritik sumber (menguji sumber) yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern merupakan kritik yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana originalitas bahan dari sumber yang telah ditemukan. Sedangkan kritik intern merupakan kritik yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran isi sumber yang telah ditemukan. Penelitian ini hanya menggunakan kritik intern, karena kritik intern lebih memperhitungkan kebenaran isi sumber.

Tahap ketiga adalah melakukan interpretasi (menguji fakta). Penulis dalam tahap ini tidak hanya menguraikan fakta dari data yang telah ditemukan, tetapi dapat menyatukan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Jadi interpretasi adalah proses menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah secara kronologis dan sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Penulisan ini dimulai dari program wajib belajar di Surabaya Tahun 1984-1985 dalam pemberitaan media massa cetak hingga dampak yang ditimbulkan dari adanya pemberitaan media massa cetak terhadap program

¹ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2009. *Sejarah Nasional Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 554.

² Haris Mudjiman. 1994. *Wajib Belajar di Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Hlm. 2.

³ Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hlm. 10.

wajib belajar di Surabaya Tahun 1984-1985 yang disusun dalam sistematika dibawah ini.

Bab I, yaitu pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka yang disertai penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu gambaran umum Surabaya, pada bab ini menjelaskan tentang Surabaya pada masa Orde Baru (1984-1985), program wajib belajar masa Orde Baru dan program kebijakan pendidikan di Surabaya.

Bab III, yaitu program wajib belajar di Surabaya tahun 1984-1985 dalam pemberitaan media massa cetak, pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan wajib belajar di Surabaya dan wajib belajar dalam pemberitaan media massa cetak.

Bab IV, yaitu dampak pemberitaan media massa cetak terhadap program wajib belajar di Surabaya, pada bab ini menjelaskan tentang masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai wajib belajar, peningkatan jumlah murid, peningkatan jumlah guru dan peningkatan jumlah gedung sekolah dasar.

Bab V, yaitu penutup, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan rumusan masalah serta jawaban yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan memuat kesimpulan, saran-saran yang diperlukan bagi pihak-pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN GAMBARAN UMUM SURABAYA

A. Surabaya Pada Masa Orde Baru (1984-1985)

Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara $07^{\circ}12' - 07^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}36' - 112^{\circ}54'$ Bujur Timur⁴. Pada tahun 1984 Surabaya masih menjadi Kotamadya daerah Tingkat Surabaya, perubahan ini berdasarkan UU No. 18 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa sebutan Kotapraja Surabaya dirubah menjadi Kotamadya daerah Tingkat Surabaya⁵. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terbagi dalam tiga wilayah kerja pembantu diantaranya yaitu: (a) wilayah kerja Pembantu Walikotamadya Surabaya Utara yang terdiri dari 5 Kecamatan, 20 Kelurahan dan 32 Desa; (b) wilayah kerja Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur yang terdiri dari 5 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 36 Desa; (c) wilayah kerja Pembantu Walikotamadya Surabaya Selatan yang

terdiri dari 6 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 35 Desa⁶.

Kota Surabaya dengan luas 290 ribu km² terus mengalami peningkatan jumlah penduduk, khususnya pada masa Orde Baru⁷. Berdasarkan Statistik Kota Surabaya dalam Angka 1980 menyebutkan bahwa jumlah penduduk dari awal Orde Baru terus semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Peningkatan jumlah penduduk di Surabaya sejalan dengan semakin berkembangnya Kota Surabaya sebagai kota terbesar di Provinsi Jawa Timur, karena Surabaya merupakan pusat industri, perdagangan, pendidikan dan pemerintahan. Sehingga banyak penduduk luar Kota Surabaya yang melakukan urbanisasi⁸ ke Kota Surabaya.

Jenis lapangan pekerjaan di Surabaya sangat beragam, diantaranya yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan pegadaian, pemerintahan dan jasa. Banyaknya jenis lapangan pekerjaan tersebut menyebabkan penduduk Surabaya dikelompokkan dalam beberapa kelompok sosial. Adanya kelompok sosial di Surabaya menunjukkan bahwa kondisi perekonomian antar masyarakat Surabaya berbeda, ada yang dalam tingkat ekonomi atas, menengah maupun bawah. Kondisi ekonomi masyarakat Surabaya inilah yang dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat Surabaya terhadap program wajib belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi atas dapat turut serta dalam program wajib belajar tersebut, sebaliknya dengan masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi bawah akan memikirkan dua kali untuk mengikuti program wajib belajar yang dapat menambah biaya pengeluaran keluarga.

Perkembangan urbanisasi di Kota Surabaya menyebabkan banyak etnis yang tinggal di Surabaya, seperti Jawa, Madura, Sunda, Batak dan Makasar. Etnis Jawa merupakan salah satu etnis yang mendominasi di Surabaya. Dominasi etnis Jawa ini membuat budaya Jawa semakin kuat dalam kehidupan masyarakat Surabaya. Budaya Jawa juga mempengaruhi pemikiran masyarakat Surabaya mengenai pendidikan. Sebagian besar masyarakat Jawa beranggapan bahwa menyekolahkan anak akan merugikan keluarga⁹. Masyarakat Jawa juga masih percaya bahwa menyekolahkan anak perempuan tidak memberikan

⁶ *Loc.cit.*

⁷ SK Mendagri Diterima Gubernur: Poernomo Kasidi Walikotamadya Surabaya dalam Surabaya Post 7 Juni 1984.

⁸ Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau perpindahan penduduk dari kota kecil ke kota besar dengan tujuan untuk menetap atau mencari pekerjaan (www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-urbanisasi-dan-faktor-pendorongnya.html.)

⁹ Santoso Sastropoetro. 1984. *Mengenal Gerakan Wajib Belajar*. Bandung: Offset Alumni. Hlm. 20.

⁴ Badan Pusat Statistik. 1985. *Surabaya dalam Angka 1984/1985*. Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya. Hlm. 1.

⁵ Aminuddin Kasdi dkk. 2008. *Surabaya dan Jejak Kepahlawanannya*. Surabaya: CV. Karina. Hlm. 64.

manfaat yang lebih, karena meskipun anak perempuan tersebut sekolah tinggi pada akhirnya akan kembali ke dapur juga¹⁰.

B. Program Wajib Belajar Masa Orde Baru

Wajib belajar merupakan salah satu program kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1984 yang bertepatan dengan hari pendidikan nasional. Wajib belajar menjadi salah satu usaha pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar. Usaha ini diarahkan agar seluruh anak usia 7-12 tahun dapat merasakan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar hingga tamat. Orang tua yang memiliki anak usia 7-12 tahun juga dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam mengantarkan anak mereka untuk masuk ke Sekolah Dasar.

Program wajib belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah didorong oleh dua kenyataan utama yakni: (1) banyaknya warga negara Indonesia berusia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar; (2) pelaksanaan ketetapan pemerintah yang tercantum dalam GBHN 1978 dan GBHN 1983¹¹. Menurut Ahmad Ali¹² pada akhir Pelita III tahun 1983/1984 masih terdapat 5% atau 1.143 juta anak usia sekolah yang belum memperoleh kesempatan belajar, hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program wajib belajar. Pelaksanaan program wajib belajar juga menjadi salah satu pemenuhan ketetapan pemerintah yang tercantum dalam GBHN 1978 dan GBHN 1983. Berdasarkan GBHN 1978 periode Repelita III ditetapkan sebagai periode persiapan wajib belajar, sedangkan berdasarkan GBHN 1983 periode Repelita IV ditetapkan sebagai periode dimulainya pelaksanaan wajib belajar.

Menurut Santoso Sastroputro terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya program wajib belajar, diantaranya yaitu geografis, perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, serta sarana dan fasilitas pendidikan¹³. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu pulau yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Persebaran pulau tersebut menyebabkan tersebar pula penduduk di Indonesia, baik di pulau kecil maupun pulau besar. Penduduk yang tinggal di pulau kecil dan terpencil cenderung tertinggal dalam segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan, karena pulau terpencil sulit dijangkau hubungannya dengan pemerintah.

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani yang penghasilannya tidak menentu, hal ini

menyebabkan perekonomian keluarga petani banyak yang berada dibawah rata-rata. Perekonomian keluarga yang rendah tersebut menyebabkan pola pikir masyarakat lebih cenderung memprioritaskan hidupnya pada bekerja, sedangkan pendidikan bukan menjadi prioritas dalam hidup mereka. Pola pikir tersebut telah menjadi tradisi yang berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat petani atau pedesaan.

Sarana dan fasilitas pendidikan juga menjadi faktor dikeluarkannya program wajib belajar, karena masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai. Melalui program wajib belajar pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan diseluruh wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat Sekolah Dasar.

Tujuan dalam pelaksanaan wajib belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah Orba yaitu keikutsertaan seluruh anak usia 7-12 tahun dalam pendidikan tingkat Sekolah Dasar hingga tamat. Keikutsertaan anak usia sekolah tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk dapat mencapai salah satu tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa¹⁴. Berdasarkan tujuan diatas dapat diketahui bahwa sasaran dalam pelaksanaan wajib belajar yaitu anak usia sekolah 7-12 tahun dan orang tua yang memiliki anak usia sekolah 7-12 tahun.

Program wajib belajar secara resmi baru dilaksanakan pada tahun 1984, tetapi perluasan kesempatan belajar pada tingkat Sekolah Dasar telah dijadikan pemerintah Orde Baru sebagai salah satu bagian dari rencana panjang 25 tahun pembangunan nasional yang dimulai pada tahun 1969. Pemerintah banyak melakukan langkah untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar pada tingkat Sekolah Dasar, salah satunya yaitu dengan meningkatkan pembangunan gedung Sekolah Dasar melalui pendirian SD inpres. Pemerintah mendirikan SD inpres diseluruh tanah air tidak lain untuk memberi kesempatan belajar kepada semua anak usia sekolah di Indonesia¹⁵.

C. Program Kebijakan Pendidikan di Surabaya

Program kebijakan pendidikan di Indonesia pada tahun 1984-1985 didasarkan pada program kebijakan pendidikan pada Repelita IV, karena tahun 1984 merupakan awal tahun pelaksanaan Repelita IV. Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) titik berat pembangunan pendidikan pada Repelita IV diletakkan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar. Perluasan pendidikan

¹⁰ *Loc.cit.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹² Ahmad Ali merupakan seorang Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

¹³ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁴ Haris Mudjiman. 1994. *Wajib Belajar di Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Hlm. 1.

¹⁵ *Lokasi SD Inpres* dalam Kompas 2 Mei 1984. Hlm. 4.

dasar diharapkan mampu menampung anak usia sekolah 7-12 tahun 100% di tingkat Sekolah Dasar. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui usaha penyempurnaan kurikulum dan penyediaan sarana prasarana berupa buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan praktek, laboratorium, penataran guru dan dosen¹⁶.

Pada Repelita IV terdapat 17 kebijakan dalam pembangunan pendidikan yang harus dilaksanakan selama lima tahun yakni: tujuan pendidikan; pendidikan pancasila; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; tanggung jawab pendidikan; perluasan pendidikan dasar; soal guru dan tenaga kependidikan; soal gedung, sarana dan prasarana pendidikan; bahasa Indonesia; pembinaan perpustakaan, penerbitan dan penerjemahan; pendidikan kejuruan dan keterampilan; perguruan tinggi; perguruan swasta; pendidikan masyarakat; pendidikan jasmani dan olahraga; pengolahan dan pelayanan pendidikan; pengawasan pendidikan yang terpadu; dan penelitian pendidikan¹⁷.

Surabaya merupakan salah satu kotamadya bagian dari Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 37 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kotamadya, 569 kecamatan dan 7.705 desa¹⁸. Surabaya sebagai bagian dari Daerah Tingkat II Jawa Timur menjadikan seluruh kebijakan pembangunan di Kotamadya Surabaya bertumpu pada kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, begitu juga pada kebijakan pembangunan pendidikan di Surabaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ana Khoirun Nisak¹⁹ kebijakan pembangunan pendidikan di Surabaya lebih diarahkan pada perluasan kesempatan belajar dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Perluasan kesempatan belajar dan pemerataan pendidikan dilakukan pemerintah Kotamadya Surabaya dengan meningkatkan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah dari jenjang tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah tingkat atas dari tahun 1984 hingga 1985. Peningkatan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah selama tahun 1984-1985 diharapkan mampu menampung 100% anak usia

Sekolah Dasar hingga usia Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dilakukan pemerintah Kotamadya Surabaya dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pendidikan, baik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama maupun Sekolah Menengah Tingkat Atas. Peningkatan mutu pendidikan juga dilaksanakan melalui program akreditasi untuk Sekolah Dasar dan Menengah Swasta. Akreditasi merupakan salah satu penilai mutu sekolah swasta yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya pemerintah Kotamadya dalam meningkatkan mutu sekolah diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan.

PROGRAM WAJIB BELAJAR DI SURABAYA TAHUN 1984-1985 DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA CETAK

A. Pelaksanaan Wajib Belajar di Surabaya

Pelaksanaan program wajib belajar di Surabaya diarahkan pada kegiatan untuk meningkatkan jumlah partisipasi anak usia sekolah di Surabaya dalam tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Program ini diawali pemerintah Kotamadya Surabaya dengan membentuk Kelompok Kerja Pemantapan Persiapan Wajib Belajar (Pokja Wajar) yang bertugas untuk melakukan pendataan jumlah anak usia 7-12 tahun di Surabaya. Pokja Wajar dibentuk diseluruh wilayah Kotamadya Surabaya, baik di Surabaya Selatan, Timur maupun Utara. Pada akhir Pelita III tahun 1983/1984 terdapat 65.139 anak usia 7-12 tahun di Surabaya²⁰. Sedangkan jumlah murid SD dan MI usia 7-12 tahun di Surabaya pada akhir Pelita III berjumlah 63.474 murid²¹. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka partisipasi murni anak usia 7-12 tahun terhadap jumlah murid SD dan MI di Surabaya masih belum tertampung 100%.

Pokja Wajar dalam melaksanakan program wajib belajar juga dengan memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat luas mengenai apa itu program wajib belajar, khususnya kepada anak usia 7-12 tahun. Penyuluhan dan penerangan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan masyarakat dapat turut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program wajib belajar yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 1984, tepatnya pada tahun ajaran baru 1984/1985. Proses penyuluhan tentang program wajib belajar dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga yang memiliki anak usia 7-12 tahun yang menjadi

¹⁶ *Ibid.*, hlm 78.

¹⁷ *Pada Pelita IV akan Dilaksanakan 17 Kebijaksanaan Pendidikan* dalam Surabaya Post, 20 Agustus 1984. Hlm. 2.

¹⁸ Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV): Buku IV. Hlm. 386. Online, diakses dari <http://bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/repelita-iv-bukuiv/> pada 27 Februari 2017 (10:21).

¹⁹ Seorang mahasiswi Universitas Negeri Surabaya yang melakukan penelitian tentang "Pembangunan Bidang Pendidikan di Surabaya Pada Masa Repelita IV Tahun 1984-1989".

²⁰ Sub Bagian PPD: Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur. *Bahan Contoh Perhitungan Indikator Pendidikan Untuk Pendidikan Dasar (SD + MI) Tahun 1983/1984*. Badan Arsip Kota Surabaya.

²¹ *Loc.cit.*

asaran program wajib belajar. Cara lain yaitu dengan menyebarkan pamflet dan poster mengenai program wajib belajar.

Pemerintah Kotamadya Surabaya juga akan meningkatkan pembangunan gedung Sekolah Dasar agar mampu menampung seluruh anak usia sekolah. Pembangunan gedung Sekolah Dasar ini dilakukan diseluruh wilayah Kotamadya Surabaya guna pemerataan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Surabaya. Pemerintah juga berharap dengan adanya peningkatan dan perbaikan gedung Sekolah Dasar di seluruh wilayah Surabaya diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program wajib belajar. Anak usia sekolah juga dapat merasakan pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan tertampung 100%.

B. Wajib Belajar dalam Pemberitaan Media Massa Cetak

1. Surabaya Post

Program wajib belajar dalam pemberitaan surat kabar harian Surabaya Post dimulai pada Mei 1984, karena pada bulan tersebut program wajib belajar mulai dilaksanakan menjadi program kebijakan pendidikan nasional. Berikut ini merupakan tabel pemberitaan mengenai program wajib belajar pada Surabaya Post.

Tabel 1
Wajib Belajar dalam Pemberitaan Surabaya Post

No.	Judul	Edisi
1.	Jatim Siap Melaksanakan Wajib Belajar	1 Mei 1984
2.	Walikota Sampaikan Dimulainya Wajib Belajar	1 Mei 1984
3.	2 Mei 1984	2 Mei 1984
4.	Dua Peristiwa Penting	2 Mei 1984
5.	Peran Masyarakat Terhadap Wajib Belajar	2 Mei 1984
6.	Presiden Serukan Masyarakat Sukseskan Wajib Belajar	3 Mei 1984
7.	Ketua DPR: Wajib Belajar Perlu Diamati Cermat	25 Juni 1984

Pemberitaan pertama diawali dengan diterbitkannya 2 artikel mengenai wajib belajar pada edisi 1 Mei 1984 dengan judul "*Jatim Siap Melaksanakan 'Wajib Belajar': 'Pok Ja' akan 'Menjaring' Anak Usia Sekolah yang Belum Tertampung*" dan "*Walikota Sampaikan Dimulainya Wajib Belajar*". Artikel pertama terbit pada edisi 1 Mei 1984 yang menjelaskan kepada para pembaca bahwa seluruh desa dan kota di Provinsi Jawa Timur telah siap untuk melaksanakan program wajib belajar yang akan diresmikan oleh Presiden pada hari berikutnya, tanggal 2 Mei 1984.

Artikel kedua pada edisi 1 Mei 1984 berjudul "*Walikota Sampaikan Dimulainya Wajib*

Belajar" menjelaskan rencana pemerintah Kotamadya Surabaya dalam menyambut pelaksanaan wajib belajar. Persiapan yang dilakukan pemerintah Kotamadya Surabaya dalam menyambut pelaksanaan wajib belajar dilakukan dengan pemantapan tim Pokja Wajar yang dibentuk diseluruh wilayah Kotamadya Surabaya. Pokja diberikan tugas untuk memberikan penyuluhan dan melakukan pendataan anak usia sekolah di Kotamadya Surabaya.

Edisi 2 Mei 1984 terdapat 3 artikel mengenai wajib belajar yang dimuat dalam surat kabar harian Surabaya Post. Artikel pertama berjudul "*Dua Peristiwa Penting*". Artikel tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membantu mensukseskan wajib belajar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah. Artikel yang kedua pada edisi 2 Mei 1984 berjudul "*2 Mei 1984*". Artikel tersebut menjelaskan bahwa tanggal 2 Mei 1984 merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia sebagai langkah awal dimulainya pelaksanaan wajib belajar bagi anak usia sekolah 7-12 tahun di Indonesia. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa masyarakat sebagai orang tua harus berpartisipasi dalam pelaksanaan wajib belajar dengan mengantarkan anak mereka ke tingkat Sekolah Dasar.

Artikel yang ketiga pada edisi 2 Mei 1984 berjudul "*Peran Masyarakat Terhadap Wajar*". Artikel tersebut menjelaskan peran masyarakat Kotamadya Surabaya dalam wajib belajar merupakan kunci utama berhasilnya pelaksanaan wajib belajar di wilayah Kotamadya Surabaya, seperti yang dijelaskan dalam kutipan artikel berikut ini:

"Usaha wajib belajar (Wajar) bukan merupakan usaha instansi, satu departemen atau usaha pemerintah saja, tetapi merupakan usaha bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Kesertaan masyarakat, terutama orang tua dalam hal ini sangat diperlukan."

Pada edisi 3 Mei 1984 hanya memuat 1 artikel mengenai wajib belajar dengan judul "*Presiden Serukan Masyarakat Sukseskan Wajib Belajar*". Artikel tersebut menjelaskan dorongan dan semangat yang diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan wajib belajar. Dorongan dan semangat tersebut disampaikan oleh Presiden Soeharto langsung saat pidato di stadion utama Senayan Jakarta. Berikut ini merupakan bagian isi Pidato Presiden Soeharto dalam kutipan artikel:

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, para orang tua dan segenap aparat pemerintah untuk ikut ambil bagian aktif dalam menyukseskan gerakan nasional yang besar ini.”.

Pemberitaan wajib belajar dalam Surabaya Post edisi 25 Juni 1984 merupakan pemberitaan terakhir berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pemberitaan tersebut memuat artikel yang berjudul “Ketua DPR: Wajib Belajar Perlu Dicermati Cermat”. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya program wajib belajar maka seluruh anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan pendidikan secara adil dan merata baik yang berada di kota besar maupun kota kecil. Artikel tersebut juga memberikan himbaun kepada pemerintah untuk selalu melakukan pengamatan terhadap jalannya program wajib belajar, khususnya untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia.

2. Jawa Pos

Program wajib belajar dalam pemberitaan surat kabar harian Jawa Pos lebih banyak dimuat pada bulan Mei 1984. Berikut ini merupakan tabel pemberitaan mengenai wajib belajar di Jawa Pos.

Tabel 2

Wajib Belajar dalam Pemberitaan Jawa Pos

No.	Judul	Edisi
1.	Gubernur Sematkan Logo Wajib Belajar	2 Mei 1984
2.	Wajib Belajar Bukan Program Mendadak	2 Mei 1984
3.	Menyambut Wajib Belajar: Pendidikan Itu Kebudayaan	2 Mei 1984
4.	Presiden Canangkan Gerakan Wajib Belajar	3 Mei 1984

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemberitaan mengenai wajib belajar di surat kabar harian Jawa Pos dimuat pada edisi 2 Mei dan 3 Mei 1984. Pada edisi 2 Mei 1984 terdapat 3 artikel mengenai wajib belajar, artikel pertama berjudul “Gubernur Sematkan Logo Wajib Belajar, Hari ini”. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Gubernur akan melakukan penyematan logo wajib belajar dan penyerahan poster wajib belajar. Poster wajib belajar akan disebar dan ditempel diseluruh desa yang ada di Provinsi Jawa Timur, termasuk desa yang ada di wilayah Kotamadya Surabaya. Penyebaran poster wajib belajar ini bertujuan agar masyarakat dapat ikut aktif dalam menyukseskan pelaksanaan wajib belajar.

Artikel kedua pada edisi 2 Mei 1984 berjudul “Wajib Belajar Bukan Program Mendadak”. Artikel tersebut menjelaskan bahwa

peran orang tua dalam pelaksanaan program wajib belajar yaitu segera mendaftarkan anak usia 7-12 tahun mereka ke tingkat Sekolah Dasar. Artikel tersebut juga menekankan bahwa sasaran dari program wajib belajar ini diharapkan pada akhir Pelita IV semua anak usia 7-12 tahun di Indonesia harus dapat tertampung seluruhnya di tingkat Sekolah Dasar²². Sasaran ini dapat tercapai jika masyarakat dan pemerintah sama-sama melaksanakan peran dan kewajibannya dalam wajib belajar.

Artikel ketiga pada edisi 2 Mei 1984 berjudul “Menyambut Wajib Belajar: Pendidikan Itu Kebudayaan”. Artikel tersebut menjelaskan bahwa adanya program wajib belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru merupakan langkah dari pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kotamadya Surabaya. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa partisipasi semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan program wajib belajar, terutama anak usia sekolah 7-12 tahun.

Pada edisi 3 Mei 1984 di surat kabar harian Jawa Pos hanya memuat 1 artikel mengenai wajib belajar dengan judul “Presiden Canangkan Gerakan Wajib Belajar”. Artikel tersebut memberikan pemahaman kepada para pembaca bahwa wajib belajar merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia yang berusia 7-12 tahun. Artikel tersebut juga memberikan arahan kepada para pembaca yang memiliki anak usia sekolah untuk memberikan dorongan kepada anaknya untuk belajar dan terus belajar.

3. Kompas

Program wajib belajar dalam pemberitaan surat kabar harian Kompas juga lebih banyak dimuat pada bulan Mei 1984. Berikut ini merupakan tabel pemberitaan mengenai wajib belajar di Kompas.

Tabel 3

Wajib Belajar dalam Pemberitaan Kompas

No.	Judul	Edisi
1.	Pendidikan Harus Punya Dua Arah	2 Mei 1984
2.	Pencanangan Wajib Belajar: Awal Pendidikan untuk Semua Orang	2 Mei 1984
3.	Presiden Canangkan Gerakan Wajib Belajar	3 Mei 1984
4.	Kita Memasuki Era Wajib Belajar	3 Mei 1984

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemberitaan mengenai wajib belajar di surat kabar harian Kompas dimuat pada edisi 2 Mei dan

²² Wajib Belajar Bukan Program Mendadak dalam Jawa Pos 2 Mei 1984. Hlm. 4.

3 Mei 1984. Pada edisi 2 Mei 1984 terdapat 2 artikel mengenai wajib belajar, artikel pertama berjudul “Pendidikan Harus Punya Dua Arah”. Artikel tersebut menjelaskan dasar pelaksanaan wajib belajar di Indonesia.

Artikel kedua pada edisi 2 Mei 1984 berjudul “Pencanangan Wajib Belajar: Awal Pendidikan untuk Semua Orang”. Artikel tersebut memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai makna wajib belajar yang dicanangkan oleh Presiden. Makna wajib belajar yang dijelaskan dalam artikel yaitu kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan secara adil dan merata.

Pada edisi 3 Mei 1984 terdapat 2 artikel mengenai wajib belajar, artikel pertama berjudul “Presiden Canangkan Gerakan Wajib Belajar”. Artikel tersebut menjelaskan mengenai sambutan Presiden Soeharto yang menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, orang tua dan aparat pemerintah untuk berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar. Presiden juga menghimbau kepada seluruh para orang tua untuk selalu memberikan dorongan dan semangat kepada anaknya untuk terus belajar.

Artikel kedua pada edisi 3 Mei 1984 berjudul “Kita Memasuki Era Wajib Belajar”. Artikel tersebut menjelaskan mengenai makna wajib belajar dan dorongan kepada masyarakat untuk selalu bekerjasama dengan pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya mensukseskan wajib belajar.

DAMPAK PEMBERITAAN MEDIA MASSA CETAK TERHADAP PROGRAM WAJIB BELAJAR DI SURABAYA

A. Masyarakat Mendapatkan Informasi dan Pengetahuan Mengenai Wajib Belajar

Pemberitaan mengenai wajib belajar dalam pemberitaan Surabaya Post, Jawa Pos dan Kompas memberikan pesan atau informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai wajib belajar. Pengetahuan tentang wajib belajar yang telah dipahami oleh sebagian besar masyarakat Surabaya tidak terlepas dari pemberitaan wajib belajar di Surabaya Post, Jawa Pos dan Kompas seperti yang terlihat dalam artikel pada Jawa Pos edisi 2 Mei 1984 yang berjudul *Wajib Belajar Bukan Program Mendadak..* Pengetahuan tentang wajib belajar juga didapat dari pemberitaan Surabaya Post edisi 2 Mei 1984 yang berjudul *Gubernur Sematkan Logo Wajib Belajar, Hari Ini.*

Pemberitaan mengenai wajib belajar juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perannya sebagai orang tua dalam pelaksanaan wajib belajar. Pengetahuan tersebut didukung dalam pemberitaan Surabaya Post edisi 1 Mei 1984 yang berjudul “*Pok Ja*” Akan “*Menjaring*” Anak Usia Sekolah yang Belum

Tertampung dan pemberitaan pada Surabaya Post edisi 2 Mei 1984 yang berjudul *Gubernur Sematkan Logo Wajib Belajar, Hari Ini.*

Adanya informasi mengenai tujuan, sasaran dan peran orang tua dalam pelaksanaan wajib belajar memberikan peningkatan pengetahuan tersendiri bagi masyarakat mengenai wajib belajar. Hal ini akan semakin meningkatkan motivasi masyarakat Surabaya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program wajib belajar di Surabaya.

B. Peningkatan Jumlah Murid

Pemberitaan wajib belajar yang ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat Surabaya dalam mensukseskan wajib belajar di Surabaya. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengantarkan anak usia sekolah 7-12 tahun mereka ke tingkat Sekolah Dasar. Partisipasi masyarakat tersebut memberikan dampak terhadap jumlah murid Sekolah Dasar di Surabaya. Pada tahun 1984/1985 jumlah murid diseluruh Kecamatan Surabaya berjumlah 295.693 siswa. Jumlah siswa tersebut mengalami peningkatan pada tahun ajaran 1985/1986 yang berjumlah 306.317 siswa yang terdiri dari 109.353 SD Negeri, 72.502 SD Inpres, 99.014 SD Swasta dan 25.448 MI²³. Peningkatan jumlah murid tersebut menunjukkan suksesnya pemerintah Kotamadya Surabaya dalam menekan jumlah anak putus sekolah.

Peningkatan jumlah murid juga menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai target untuk menampung seluruh anak sekolah usia 7-12 tahun di Surabaya. Jumlah anak usia sekolah 7-12 tahun per wilayah kecamatan di Surabaya pada tahun 1985 yaitu di Surabaya Selatan sebanyak 115.093 siswa, di Surabaya Timur berjumlah 89.076 siswa dan di Surabaya Utara sebanyak 86.296 siswa²⁴. Sedangkan jumlah murid seluruhnya pada tahun ajaran 1985/1986 yaitu 306.317 siswa.

C. Peningkatan Jumlah Guru

Guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah tidak hanya mengutamakan pemerataan pendidikan guna mensukseskan wajib belajar, tetapi juga harus tetap mengutamakan kualitas dan mutu pendidikan. Karena anak didik merupakan generasi penerus bangsa yang akan meningkatkan dan melanjutkan pembangunan nasional. Oleh karena itu dunia pendidikan harus mampu memberikan proses yang baik untuk menghasilkan anak didik dengan kualitas dan mutu yang tinggi. Guru menjadi salah satu jembatan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

²³ Badan Pusat Statistik. 1987. *Surabaya dalam Angka 1987*. Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya. Hlm. 89-93.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *op.cit.*, hlm. 47.

Peningkatan jumlah siswa Sekolah Dasar di Surabaya juga disertai dengan peningkatan guru di seluruh Kecamatan Surabaya. Pada tahun 1984/1985 jumlah guru telah menyebar diseluruh wilayah Kecamatan Surabaya yang disesuaikan dengan jumlah Sekolah Dasar di kecamatan. Jumlah guru Sekolah Dasar di Surabaya mengalami peningkatan pada tahun ajaran 1985/1986 mencapai 10.783 guru yang terdiri dari 3.349 guru Sekolah Dasar Negeri, 2.253 guru Sekolah Dasar Inpres, 4.117 guru Sekolah Dasar Swasta dan 964 guru Madrasah Ibtidaiyah²⁵.

D. Peningkatan Jumlah Gedung Sekolah Dasar

Banyaknya pemberitaan mengenai wajib belajar dalam media massa cetak Surabaya menyebabkan pemerintah Kotamadya Surabaya semakin berupaya untuk meningkatkan sarana pendidikan, khususnya gedung pendidikan Sekolah Dasar di Surabaya. Pembangunan gedung Sekolah Dasar dilakukan diseluruh wilayah Kota Surabaya guna pemerataan pendidikan dasar di Surabaya dalam mensukseskan wajib belajar.

Pembangunan gedung SD di wilayah Surabaya didukung oleh pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Bentuk dukungan pemerintah Daerah Jawa Timur yaitu dengan memberikan subsidi atau bantuan terhadap pelaksanaan dan pembinaan pengembangan Sekolah Dasar Pamong dan Sekolah Dasar Kecil di Kotamadya Surabaya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 279 tahun 1984 tentang Lokasi Proyek Pengembangan Sekolah Dasar Pamong dan Sekolah Dasar Kecil di Jawa Timur tahun 1984/1985 menyebutkan bahwa lokasi Sekolah Dasar Pamong di Kotamadya Surabaya terdapat di Desa Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri. Bantuan yang diberikan hanya untuk pengembangan Sekolah Dasar Pamong saja, karena di Surabaya tidak terdapat daerah terisolasi sehingga tidak mendapatkan bantuan untuk pengembangan lokasi Sekolah Dasar Kecil²⁶. Pemerintah Kotamadya juga telah mendirikan SD Pamong yang didirikan di daerah nelayan, seperti Sukolilo, Kenjeran, Rungkut dan daerah pertanian seperti Tandes yang tiap lokasi jumlah muridnya rata-rata 17 orang²⁷. SD Pamong ini diperuntukkan untuk semua murid yang tidak ditentukan usianya, karena mereka juga bekerja.

Bentuk dukungan pemerintah Pusat berupa bantuan pembangunan Sekolah Dasar bagi Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk Kotamadya Surabaya. Bantuan pembangunan Sekolah Dasar yang diberikan digunakan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar, penambahan

ruang kelas, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, pembangunan perumahan guru, pembangunan rumah dinas penjaga sekolah dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar negeri, swasta dan Madrasah Ibtidaiyah swasta²⁸. Kepala Cabang Dinas P dan K Kotamadya Surabaya Daerah Tk. II Surabaya mengusulkan mengenai calon penjaga SDN Inpres untuk mengawasi jalannya pembangunan gedung baru SDN Unit 1 sebanyak 4 (empat) di Kotamadya Surabaya²⁹. Bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar juga diberikan kepada SDN Percobaan Surabaya yang bertempat di Ketintang kompleks kampus Unesa³⁰.

Peningkatan pembangunan Sekolah Dasar berdampak pada bertambahnya gedung Sekolah Dasar di Surabaya. Pada tahun 1984/1985 pembangunan gedung Sekolah Dasar telah menyebar diseluruh wilayah Surabaya, setiap kecamatan rata-rata memiliki gedung Sekolah Dasar lebih dari 20 unit. Jumlah gedung Sekolah Dasar seluruhnya pada 19 kecamatan mencapai 1.014 unit yang terdiri dari 5.017 ruang belajar dan 7.361 kelas. Jumlah gedung tersebut mengalami peningkatan pada tahun 1985/1986 menjadi 1.155 gedung Sekolah Dasar yang terdiri dari 6.116 ruang belajar dan 8.368 kelas³¹.

Pemerintah Kotamadya Surabaya juga memberikan subsidi atau bantuan kepada Sekolah Dasar di Surabaya berupa alat-alat sekolah. Penyaluran alat-alat sekolah ini dilakukan pemerintah Surabaya melalui koperasi sekolah³². Pemerintah berharap dengan adanya bantuan alat-alat sekolah dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemerintah Kotamadya Surabaya juga menyalurkan subsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Dasar yang khusus digunakan untuk pengadaan buku bacaan anak, peralatan olahraga dan bahan pelajaran dalam bentuk modul bagi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta³³.

²⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kpupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa.

²⁹ Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 413.5/467/411.32/1986 tentang Usul Calon Penjaga SDN Inpres.

³⁰ Wawancara dengan Dra. Munaiyah (Kepala Seksi Kurikulum dan Pembinaan Pendidikan Dasar) yang dulu merupakan seorang guru di SDN Percobaan Surabaya pada 13 Maret 2017, wawancara ini membicarakan tentang "Dampak Pemberitaan Media Massa Cetak Terhadap Program Wajib Belajar di Surabaya" di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang beralamatkan di Jagir Wonokromo No. 354-356, Surabaya.

³¹ Badan Pusat Statistik, *op.cit.*, hlm. 89.

³² Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 425.3/2659/411.21/1985 tentang penyaluran alat-alat sekolah melalui koperasi.

³³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984, *op.cit.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 89-93.

²⁶ *Walikota Sampaikan Dimulainya Wajib Belajar dalam Surabaya Post 1 Mei 1984*. Hlm. 2

²⁷ *Loc.cit.*

PENUTUP SIMPULAN

Berdasarkan analisis wajib belajar dalam pemberitaan media massa cetak dan dampak pemberitaan terhadap program wajib belajar di Surabaya tahun 1984-1985 yang telah dilakukan. Surabaya Post merupakan surat kabar yang paling banyak memuat pemberitaan mengenai wajib belajar dibandingkan surat kabar lain, yakni Jawa Pos dan Kompas.

Wajib Belajar dalam pemberitaan surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos dan Kompas berupa artikel yang dimuat dari edisi 2 Mei 1984, karena tanggal tersebut merupakan dimulainya pelaksanaan wajib belajar di Indonesia. Wajib belajar dalam pemberitaan Surabaya Post terlihat pada sajian artikel yang memberikan informasi mengenai wajib belajar. Isi informasi tersebut antara lain, seperti penjelasan persiapan Surabaya dalam melaksanakan wajib belajar dan seruan dorongan kepada masyarakat serta seluruh anak Indonesia untuk membantu mensukseskan pelaksanaan wajib belajar.

Pemberitaan wajib belajar dalam surat kabar Jawa Pos juga terlihat pada sajian artikel yang memberikan informasi mengenai wajib belajar, seperti penjelasan sasaran wajib belajar, peran masyarakat sebagai orang tua dalam wajib belajar dan agenda penempelan poster, spanduk, papan penerangan serta pamflet wajib belajar diseluruh wilayah kota Surabaya. Sedangkan wajib belajar dalam pemberitaan Kompas berupa sajian artikel yang memberikan informasi mengenai dasar pelaksanaan dan makna wajib belajar di Indonesia serta himbauan kepada seluruh masyarakat, orang tua dan pemerintah untuk turut aktif dalam pelaksanaan wajib belajar.

Pemberitaan dalam media massa cetak mengenai wajib belajar secara tidak langsung memberikan dampak terhadap wajib belajar di Surabaya. Dampak yang ditimbulkan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai wajib belajar melalui pesan atau informasi yang disampaikan dalam artikel pada pemberitaan Surabaya Post, Jawa Pos dan Kompas. Pemberitaan juga berdampak pada peningkatan jumlah murid, guru dan gedung Sekolah Dasar. Pada tahun 1984/1985 jumlah murid diseluruh Kecamatan Surabaya berjumlah 295.693 siswa dan mengalami peningkatan pada tahun 1985/1986 sebanyak 306.317 siswa. Peningkatan jumlah murid juga menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai target untuk menampung seluruh anak sekolah usia 7-12 tahun di Surabaya.

Pada tahun 1984/1985 jumlah guru diseluruh wilayah Kecamatan Surabaya berjumlah 7.430 guru dan mengalami peningkatan pada tahun ajaran 1985/1986 sebanyak 10.783 guru. Pada tahun 1984/1985 pembangunan gedung Sekolah Dasar diseluruh wilayah Surabaya mencapai 1.014

unit gedung dan mengalami peningkatan pada tahun 1985/1986 menjadi 1.155 gedung Sekolah Dasar.

SARAN

Media massa cetak, khususnya surat kabar memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi melalui isi pesan yang disampaikan oleh surat kabar. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali isi pesan yang disampaikan agar dapat berfungsi semestinya yakni sebagai sarana informasi, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat. Masyarakat juga diharapkan dapat mampu memanfaatkan seluruh media massa yang ada dengan baik.

Adanya pemberitaan mengenai wajib belajar pemerintah Orba dalam media massa cetak Surabaya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Surabaya, diharapkan untuk pemerintah Surabaya terus meningkatkan informasi kepada masyarakat Surabaya akan pentingnya pendidikan. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan berbagai media massa yang ada. Agar lebih banyak lagi informasi dan sajian berita yang dapat mempengaruhi para pembaca akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka, khususnya pendidikan dasar.

Bagi seluruh masyarakat agar secara aktif berpartisipasi dalam seluruh program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk program kebijakan pendidikan. Hal ini dilakukan agar sasaran dan tujuan dari setiap program kebijakan dapat tercapai. Masyarakat juga dapat merasakan langsung dampak dari program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 279 Tahun 1984 tentang Lokasi Proyek Pengembangan Sekolah Dasar Pamong dan Sekolah Dasar Kecil di Jawa Timur Tahun 1984/1985.
- Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 425.3/2659/411.21/1985 tentang Penyaluran Alat-alat Sekolah Melalui Koperasi.
- Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 413.5/467/411.32/1986 tentang Usul Calon Penjaga SD Inpres.

SURAT KABAR

- 2 Mei 1984, Surabaya Post 2 Mei 1984.
Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Swasta, Surabaya Post 8 Mei 1984.
Dua Peristiwa Penting, Surabaya Post 2 Mei 1984.
Gubernur Sematkan Logo Wajib Belajar, Hari Ini, Jawa Pos 2 Mei 1984.
JATIM Siap Melaksanakan Wajib Belajar, Surabaya Post 1 Mei 1984.
Ketua DPR: Wajib Belajar Perlu Diamati Cermat, Surabaya Post 25 Juni 1984.
Kita Memasuki Era Wajib Belajar, Kompas 3 Mei 1984.
Kurikulum SMTA Diperbaiki, Surabaya Post 12 Juni 1984.
Lokasi SD Inpres, Kompas 2 Mei 1984.
Menyambut Wajib Belajar: Pendidikan Itu Kebudayaan, Jawa Pos 2 Mei 1984.
Pada Pelita IV akan Dilaksanakan 17 Kebijakan Pendidikan, Surabaya Post 20 Agustus 1984.
Pendidikan Harus Punya Dua Arah, Kompas 2 Mei 1984.
Pengertian "Wajib Belajar" di Indonesia Berbeda dengan Eropa, Surabaya Post 16 Oktober 1981.
Peran Masyarakat Terhadap Wajar, Surabaya Post 2 Mei 1984.
Presiden Canangkan Gerakan Wajib Belajar, Jawa Pos 3 Mei 1984.
Presiden Canangkan Gerakan Wajib Belajar, Kompas, 3 Mei 1984.
Presiden Serukan Masyarakat Sukseskan Wajib Belajar, Surabaya Post 3 Mei 1984.
Pencanangan Wajib Belajar: Awal Pendidikan untuk Semua Orang, Kompas 2 Mei 1984.
SK Mendagri Diterima Gubernur: Poernomo Kasidi Walikotamadya Surabaya, Surabaya Post 7 Juni 1984.
Tata Cara Menjadi "Orang Tua Asuh": Anak Kurang Mampu Digolongkan dalam 5 Kelompok, Surabaya Post 23 Juli 1984.
Wajib Belajar Bukan Program Mendadak, Jawa Pos 2 Mei 1984.
Walikota Sampaikan Dimulainya Wajib Belajar, Surabaya Post 1 Mei 1984.

DOKUMEN

- Sub Bagian PPD Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur: Cara Menentukan Indikator Pendidikan Dasar dengan Contoh Perhitungannya.

SKRIPSI

- Dewi Cahyaningsih, Galuh. 2016. *Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

- Firmansyah, Ferry. 2013. *Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia Periode 1994-2008*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
 Nisak, Ana Khoirun. 2016. *Pembangunan Bidang Pendidikan di Surabaya Pada Masa REPELITA IV Tahun 1984-1989*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

BUKU

- Aziz, Arnacun. 1994. *LIMA GBHN*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Badan Pusat Statistik. 1985. *Surabaya dalam Angka 1984-1985*. Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya.
 Badan Pusat Statistik. 1987. *Surabaya dalam Angka 1987*. Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya.
 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 1983. *Jawa Timur dalam Angka 1983*. Prop. Jawa Timur
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Lima Repelita dan Kebudayaan*. Jakarta: PUSBUK.
 Departemen Penerangan RI. 1985. *Lampiran Pidato Kenegaraan Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1985*. Jakarta: Deprtemen Penerangan RI.
 Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
 Kasdi, Aminuddin dkk. 2008. *Surabaya dan Jejak Kepahlawanannya*. Surabaya: CV Karina.
 Meinanda, Teguh. 1989. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV. Armico.
 Mudjiman, Haris. 1994. *Wajib Belajar di Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
 Sastropoetro, Santoso. 1984. *Mengenal Gerakan Wajib Belajar*. Bandung: Offset Alumni.
 Soyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
 Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2009. *Sejarah Nasional Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta : Balai Pustaka.
 Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2007. *Ilmu & Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.
 Wahyudi. 1986. *Media Komunikasi Massa Televisi*. Bandung: Offset Alumni.

WAWANCARA

- Munaiyah (Kepala Seksi Kurikulum dan Pembinaan Pendidikan Dasar). 2017. Wawancara tentang "Dampak Pemberitaan Media Massa Cetak Terhadap Program Wajib Belajar di Surabaya" pada 13 Maret 2017 di Kantor Dinas Pendidikan Kota

Surabaya. Jalan Jagir Wonokromo No.
354-356, Surabaya.

INTERNET

Handayani, Titik. 2012. *Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun*. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. VII, No. 1 diakses dari http://pustaka.kependudukan.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/4107/MENYONGSONG_KEBIJAKAN_PENDIDIKAN_MENENGAH_UNIVERSAL.pdf pada tanggal 25 April 2017 (09.40)

Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV): Buku IV, diakses dari <http://bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/repelita-iv-bukuiv/> pada 27 Februari 2017 (10:21).

